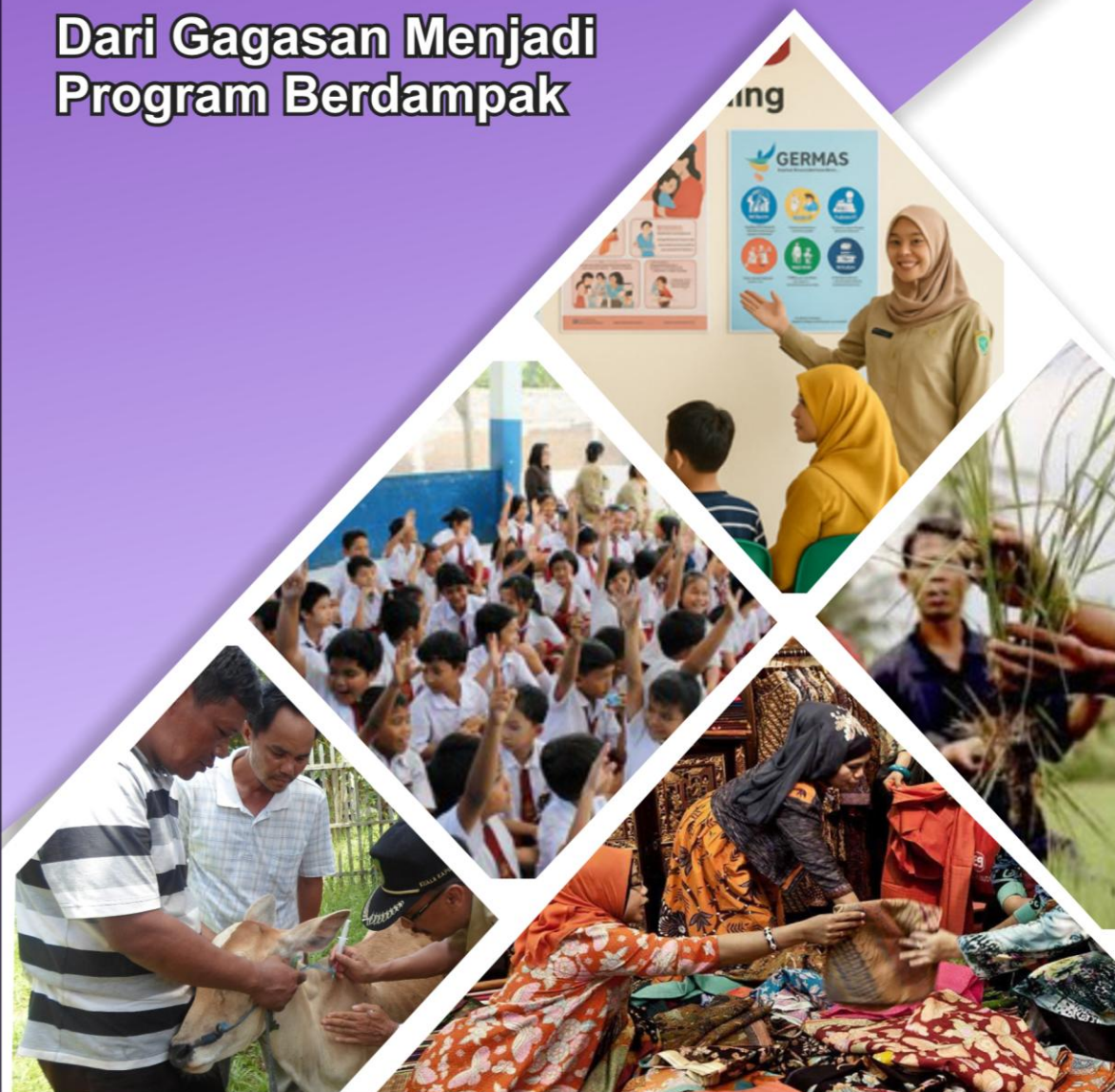


Dr. Uswatun Khasanah M.Pd.I
Arsyil Waritsman, S.Pd., M.Pd.



DESAIN DAN METODOLOGI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

Dari Gagasan Menjadi
Program Berdampak



DESAIN DAN METODOLOGI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
DARI GAGASAN MENJADI PROGRAM BERDAMPAK

Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I
Arsyil Waritsman, S.Pd., M.Pd



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**DESAIN DAN METODOLOGI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:
DARI GAGASAN MENJADI PROGRAM BERDAMPAK**

Penulis:

Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I

Arsyil Waritsman, S.Pd., M.Pd

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

xx, 165, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-324-4

Cetakan Pertama:

Oktober 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab penerbit

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,

Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga buku referensi yang berjudul ***Desain dan Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat: Dari Gagasan Menjadi Program Berdampak*** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bagian dari ikhtiar akademik untuk memperkuat pemahaman, keterampilan, dan tradisi metodologis dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), khususnya di lingkungan perguruan tinggi.

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu pilar utama Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki kedudukan penting dalam mempertemukan dunia akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, PKM masih sering dipahami sebatas kegiatan pelengkap, kegiatan seremonial, atau pemenuhan kewajiban administratif perguruan tinggi. Tidak sedikit program pengabdian yang berhenti pada pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta, dokumentasi, dan laporan administratif, sementara pertanyaan yang lebih mendasar apakah program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, menghasilkan perubahan, memberikan manfaat yang berkelanjutan, dan dapat dibuktikan dampaknya belum selalu memperoleh perhatian yang memadai.

Cara pandang tersebut perlu terus dikembangkan. Pengabdian kepada Masyarakat semestinya tidak berhenti pada pertanyaan **“kegiatan apa yang akan dilaksanakan?”**, tetapi bergerak lebih jauh menuju pertanyaan **“masalah apa yang hendak diselesaikan, mengapa masalah tersebut penting, bagaimana masyarakat dilibatkan, metode apa yang paling sesuai, perubahan apa yang diharapkan, dan bagaimana perubahan tersebut dapat dibuktikan?”** Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi salah satu dasar pemikiran dalam penyusunan buku ini.

Sebagaimana dikembangkan dalam buku ini, PKM perlu ditempatkan sebagai proses akademik yang sistematis, kontekstual, partisipatif, terukur, dan berorientasi pada perubahan. Masyarakat tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek sekaligus mitra yang memiliki pengetahuan, pengalaman, aset, potensi, serta kapasitas untuk terlibat dalam proses perubahan. Perguruan tinggi hadir bukan semata-mata sebagai pihak yang membawa solusi, melainkan sebagai mitra yang belajar bersama masyarakat,

memfasilitasi proses, mengembangkan kapasitas, dan menghubungkan pengetahuan akademik dengan pengetahuan lokal.

Pemikiran tersebut menjadi fondasi penting dalam keseluruhan pembahasan buku ini. Pada bagian awal, pembaca diajak memahami konsep, hakikat, prinsip, dan paradigma PKM serta melihat pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada kekurangan menuju pendekatan yang lebih partisipatif, berbasis aset, pemberdayaan, dan kemitraan. Buku ini juga menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki ruang untuk terlibat dalam menentukan persoalan, merumuskan kebutuhan, memilih strategi, melaksanakan program, serta menilai perubahan yang terjadi.

Dari fondasi konseptual tersebut, pembahasan kemudian diarahkan pada proses identifikasi masalah dan analisis kebutuhan masyarakat. Tahap ini dipandang sebagai bagian yang sangat menentukan karena kualitas sebuah program sering kali ditentukan oleh kualitas diagnosis awalnya. Program yang dirancang tanpa pemahaman yang memadai terhadap kondisi masyarakat berisiko menghasilkan intervensi yang tidak tepat sasaran. Sebaliknya, proses identifikasi masalah yang dilakukan secara sistematis dapat membantu pelaksana memahami kesenjangan, akar masalah, kebutuhan, potensi, serta aset yang tersedia di masyarakat.

Buku ini selanjutnya membawa pembaca pada proses desain program Pengabdian kepada Masyarakat. Gagasan yang baik belum tentu menjadi program yang baik apabila tidak diterjemahkan ke dalam desain yang jelas. Oleh karena itu, pembahasan mencakup penentuan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan tahapan kegiatan, indikator keberhasilan, logical framework, perencanaan waktu, sumber daya, anggaran, keberlanjutan, serta proses reviu dan penyempurnaan desain program. Dengan demikian, desain program tidak dipahami sebagai sekadar dokumen proposal, melainkan sebagai kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana suatu intervensi diharapkan menghasilkan perubahan.

Aspek metodologi memperoleh perhatian khusus dalam buku ini. Pengabdian yang memiliki tujuan berbeda, karakteristik masyarakat berbeda, serta konteks sosial yang berbeda tentu tidak dapat selalu menggunakan metode yang sama. Karena itu, buku ini membahas berbagai pendekatan, antara lain pendekatan partisipatif, pemberdayaan, kolaboratif, transformatif, berbasis masalah dan kebutuhan, serta berbasis aset dan potensi lokal. Pembahasan kemudian diperdalam melalui metode *Participatory Action Research (PAR)*, *Asset-*

Based Community Development (ABCD), dan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* beserta teknik-teknik partisipatif yang relevan.

PAR, ABCD, dan PRA dalam buku ini tidak diposisikan sebagai metode yang harus digunakan secara seragam dalam setiap program. Masing-masing memiliki karakteristik, kekuatan, keterbatasan, serta konteks penerapan yang berbeda. Karena itu, kemampuan metodologis pelaksana PKM tidak hanya terletak pada kemampuan menyebutkan nama suatu metode, tetapi terutama pada kemampuan memahami mengapa suatu metode dipilih, bagaimana metode tersebut diterapkan, bagaimana masyarakat dilibatkan, serta bagaimana data dan proses perubahan didokumentasikan dan dianalisis.

Selanjutnya, buku ini membahas strategi pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan tidak semestinya dimaknai sebagai proses memberikan bantuan secara terus-menerus, melainkan sebagai proses membangun kemampuan masyarakat agar semakin mampu mengidentifikasi persoalan, mengambil keputusan, mengelola sumber daya, mengembangkan kelembagaan, serta melanjutkan perubahan secara mandiri. Oleh sebab itu, aspek pelatihan, pendampingan, coaching, mentoring, penguatan kelembagaan, kemandirian, strategi perubahan, keberlanjutan, hingga exit strategy menjadi bagian penting dalam pembahasan.

Program yang telah dirancang dan dipilih metodologinya tentu harus diterjemahkan ke dalam implementasi yang terkelola dengan baik. Dalam konteks ini, buku juga membahas persiapan dan pengorganisasian program, koordinasi dengan mitra, pembagian peran dan tanggung jawab, pengendalian kegiatan, pengelolaan sumber daya dan anggaran, manajemen risiko, dokumentasi, pengendalian mutu, serta manajemen konflik. Aspek-aspek tersebut penting karena dinamika lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun di atas kertas. Kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan arah dan tujuan program menjadi bagian penting dari kompetensi pelaksana

Hal lain yang menjadi perhatian utama buku ini adalah monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak. Pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai jadwal belum otomatis menunjukkan bahwa sebuah program berhasil. Demikian pula banyaknya peserta, terselenggaranya pelatihan, atau dihasilkannya suatu produk belum dengan sendirinya membuktikan terjadinya perubahan. Oleh karena itu, pembaca diajak membedakan antara input, aktivitas, output, outcome, dan impact serta memahami pentingnya indikator dan instrumen yang dapat digunakan untuk melihat perubahan secara lebih objektif.

Orientasi pada dampak menjadi salah satu gagasan utama yang mengikat keseluruhan isi buku. PKM perlu bergerak dari orientasi “kegiatan terlaksana” menuju “perubahan dapat dibuktikan”. Pergeseran ini membutuhkan perencanaan sejak awal, bukan baru dilakukan setelah kegiatan selesai. *Logical framework*, indikator, baseline, monitoring, evaluasi, dokumentasi, serta pengukuran *outcome* dan *impact* perlu dirancang sebagai bagian yang terintegrasi dalam keseluruhan siklus program. Dengan demikian, dampak tidak sekadar menjadi klaim dalam laporan, tetapi memiliki bukti yang dapat ditelusuri.

Dalam konteks yang semakin kompleks, pengabdian kepada masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan membangun kemitraan dan ekosistem kolaborasi. Persoalan pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat sering kali memiliki dimensi yang saling berhubungan sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, komunitas, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya memiliki sumber daya dan kapasitas yang dapat saling melengkapi. Karena itu, buku ini juga membahas pemetaan stakeholder, strategi membangun kolaborasi, model pentahelix, jejaring mitra, ekosistem pengabdian, dan pendanaan kolaboratif.

Bagian penting lainnya adalah bagaimana hasil PkM dapat dikomunikasikan dan dipertanggungjawabkan secara akademik. Program yang baik perlu didokumentasikan dengan baik, dilaporkan secara sistematis, dan apabila memungkinkan dikembangkan menjadi artikel ilmiah serta berbagai bentuk diseminasi pengetahuan. Oleh sebab itu, buku ini memberikan perhatian terhadap struktur proposal, metode dan rencana pelaksanaan, indikator dan luaran, laporan hasil pengabdian, dokumentasi, penulisan artikel ilmiah, publikasi, diseminasi, hingga pertimbangan praktis dalam memilih jurnal dan menghindari jurnal predator.

Pada bagian akhir, buku ini mengangkat persoalan etika, inovasi, dan transformasi Pengabdian kepada Masyarakat. PKM bukan hanya persoalan bagaimana suatu program dapat dilaksanakan secara efektif, tetapi juga bagaimana program tersebut dilaksanakan secara etis, menghormati martabat masyarakat, menjaga kesetaraan dan inklusivitas, melindungi data, serta bertanggung jawab dalam dokumentasi dan publikasi. Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru bagi pengembangan model PkM, sementara agenda keberlanjutan dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) memberikan ruang

yang lebih luas bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan pengabdian yang relevan dengan tantangan masyarakat kontemporer.

Buku ini dengan demikian tidak dimaksudkan hanya sebagai kumpulan teori tentang Pengabdian kepada Masyarakat. Lebih dari itu, buku ini dirancang sebagai peta perjalanan metodologis, mulai dari menemukan dan memahami persoalan, menyusun diagnosis kebutuhan, merumuskan gagasan, mendesain program, menentukan pendekatan dan metode, melaksanakan intervensi, melakukan monitoring dan evaluasi, mengukur perubahan, membangun keberlanjutan, mengembangkan kemitraan, hingga mendokumentasikan dan mempublikasikan hasilnya.

Judul *Dari Gagasan Menjadi Program Berdampak* sengaja dipilih untuk menegaskan alur tersebut. Sebuah gagasan pengabdian dapat muncul dari hasil penelitian, pengalaman lapangan, kebutuhan masyarakat, kebijakan pembangunan, perkembangan teknologi, persoalan pendidikan, potensi lokal, maupun berbagai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi, gagasan tersebut baru memiliki nilai akademik dan sosial yang lebih kuat ketika mampu diterjemahkan menjadi program yang dirancang secara sistematis, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dievaluasi secara objektif, dan menghasilkan perubahan yang dapat dibuktikan.

Buku ini juga berangkat dari kesadaran bahwa tidak ada satu metode yang dapat menjawab seluruh persoalan masyarakat. Setiap komunitas memiliki karakteristik, kebutuhan, sejarah, budaya, struktur sosial, sumber daya, serta potensi yang berbeda. Karena itu, metodologi PkM perlu dipahami secara fleksibel namun tetap memiliki dasar akademik yang kuat. Pemilihan metode hendaknya tidak dilakukan karena metode tersebut sedang populer atau sering digunakan dalam proposal, tetapi karena terdapat alasan metodologis yang jelas bahwa metode tersebut sesuai dengan tujuan, karakteristik masyarakat, sumber daya, serta perubahan yang ingin dicapai.

Dalam penyusunannya, buku ini berusaha menjembatani dua kebutuhan sekaligus. Di satu sisi, pembaca membutuhkan landasan konseptual dan teoritis agar memahami mengapa suatu pendekatan atau metode digunakan. Di sisi lain, pembaca membutuhkan panduan praktis agar mampu menerjemahkan konsep tersebut ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Karena itu, pembahasan dalam buku dilengkapi dengan tabel, kerangka logis, ilustrasi, model, alur, dan berbagai contoh yang diharapkan dapat membantu pembaca menghubungkan teori dengan praktik. Beberapa visual dalam buku, misalnya

kerangka karakteristik program PkM berkualitas, alur *Theory of Change*, siklus PAR, kategori aset ABCD, model pentahelix, serta alur penulisan proposal dan publikasi, dirancang untuk membantu pembaca memahami hubungan antarkomponen secara lebih sistematis.

Buku ini ditujukan kepada pembaca yang memiliki kepentingan dalam pengembangan dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Dosen dan peneliti dapat memanfaatkannya sebagai referensi dalam menyusun proposal maupun merancang program. Mahasiswa jenjang sarjana, magister, maupun doktor dapat menggunakannya untuk memahami metodologi pengabdian dan mengembangkan kegiatan berbasis masyarakat. Pengelola lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai bahan penguatan kapasitas kelembagaan. Praktisi pemberdayaan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, pengelola program pembangunan, serta berbagai mitra perguruan tinggi juga dapat menggunakannya sesuai kebutuhan masing-masing.

Bagi mahasiswa, khususnya, buku ini diharapkan dapat menumbuhkan cara pandang bahwa keterlibatan dalam masyarakat bukan hanya kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh di ruang kuliah. Masyarakat juga merupakan ruang belajar yang menyediakan pengetahuan, pengalaman, dan persoalan nyata yang tidak selalu dapat ditemukan dalam buku teks. Interaksi yang sehat antara mahasiswa dan masyarakat dapat menjadi proses pembelajaran yang membentuk kemampuan berpikir kritis, empati sosial, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan tanggung jawab akademik.

Bagi dosen dan peneliti, buku ini diharapkan dapat memperkuat budaya pengabdian yang berbasis bukti dan metodologi. PKM tidak perlu dipertentangkan dengan penelitian dan pendidikan. Ketiganya justru dapat saling memperkaya. Hasil penelitian dapat menjadi dasar pengembangan program pengabdian; pengalaman pengabdian dapat menghasilkan persoalan dan data baru untuk penelitian; sementara proses pendidikan dapat mempersiapkan mahasiswa untuk terlibat secara kompeten dalam penelitian dan pengabdian. Dengan cara pandang demikian, Tridharma Perguruan Tinggi tidak berjalan sebagai tiga aktivitas yang terpisah, melainkan sebagai satu ekosistem akademik yang saling menguatkan.

Pada akhirnya, keberhasilan Pengabdian kepada Masyarakat tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan, seberapa banyak peserta yang hadir, atau seberapa banyak laporan yang dapat diselesaikan.

Keberhasilan yang lebih substantif terletak pada sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat, kapasitas masyarakat berkembang, perubahan dapat dipertahankan, dan pengetahuan yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan maupun penyelesaian persoalan sosial.

Karena itu, buku ini mengajak pembaca untuk melihat PkM sebagai sebuah siklus perubahan. Siklus tersebut dimulai dari mendengarkan masyarakat, memahami konteks, mengidentifikasi masalah dan potensi, merancang program bersama, memilih metodologi yang sesuai, melaksanakan tindakan, mengamati perubahan, melakukan refleksi, mengevaluasi hasil, memperbaiki program, membangun keberlanjutan, dan mendiseminasikan pembelajaran. Siklus tersebut tidak selalu berjalan linear. Dalam banyak situasi, proses pengabdian justru membutuhkan penyesuaian, refleksi, dan pembelajaran berulang sesuai dengan dinamika masyarakat.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bidang yang sangat luas dan terus berkembang seiring perubahan sosial, teknologi, kebijakan, serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, buku ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya sumber yang harus digunakan secara mutlak. Sebaliknya, buku ini diharapkan menjadi salah satu pintu masuk bagi pembaca untuk terus membaca, berdiskusi, melakukan refleksi, mengembangkan pengalaman lapangan, dan memperkaya metodologi pengabdian sesuai konteks masing-masing.

Kami juga menyadari bahwa setiap wilayah dan komunitas memiliki keunikan. Contoh-contoh yang disajikan dalam buku ini karena itu perlu dipahami sebagai ilustrasi, bukan sebagai formula yang harus diterapkan secara identik. Pelaksana PkM tetap perlu melakukan analisis konteks, berdialog dengan masyarakat, mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, serta menyesuaikan metode dengan kebutuhan dan karakteristik kelompok sasaran.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, gagasan, pengalaman, kritik, dan inspirasi dalam proses penyusunan buku ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat di lingkungan perguruan tinggi, para peneliti, praktisi pemberdayaan masyarakat, mahasiswa, mitra masyarakat, lembaga pengelola penelitian dan pengabdian, serta berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran yang dituangkan dalam buku ini. Terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada keluarga dan semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, waktu, serta penguatan selama proses

penulisan. Penyusunan sebuah buku akademik bukanlah pekerjaan yang selesai dalam satu waktu. Ia membutuhkan proses membaca, menulis, berdiskusi, merevisi, melakukan refleksi, dan terus belajar. Oleh karena itu, hadirnya buku ini merupakan bagian dari proses akademik yang masih terus berlangsung.

Kami berharap buku *Desain dan Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat: Dari Gagasan Menjadi Program Berdampak* dapat memberikan manfaat bagi pengembangan budaya akademik dan penguatan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat di Indonesia. Semoga buku ini dapat membantu dosen, mahasiswa, peneliti, praktisi, pengelola program, serta berbagai mitra masyarakat untuk merancang pengabdian yang tidak hanya terlaksana, tetapi juga terarah, terukur, dapat dipertanggungjawabkan, berkelanjutan, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Lebih jauh, kami berharap buku ini dapat menjadi pengingat bahwa inti dari Pengabdian kepada Masyarakat bukan semata-mata tentang keberhasilan perguruan tinggi menyelesaikan sebuah program, melainkan tentang kemampuan semua pihak untuk belajar bersama, bekerja bersama, membangun kapasitas bersama, dan menciptakan perubahan bersama. Dalam kerangka tersebut, masyarakat bukan sekadar tempat pelaksanaan program, melainkan mitra utama dalam membangun pengetahuan dan perubahan sosial.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang ada, buku ini kami persembahkan bagi penguatan tradisi Pengabdian kepada Masyarakat yang lebih metodologis, partisipatif, kontekstual, inklusif, terukur, etis, dan berorientasi pada dampak. Kritik, saran, dan masukan konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan buku ini pada edisi-edisi berikutnya.

Semoga setiap gagasan yang lahir dari buku ini dapat berkembang menjadi program yang bermanfaat, setiap program dapat menghasilkan pembelajaran, setiap pembelajaran dapat melahirkan inovasi, dan setiap inovasi dapat menghadirkan perubahan yang bermakna bagi masyarakat.

Semarang, 22 September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB 1 KONSEP DAN PARADIGMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1
1.1 Konsep dan Hakikat Pengabdian kepada Masyarakat	1
1.2 Tujuan dan Prinsip Pengabdian kepada Masyarakat	3
1.3 Paradigma Pengabdian kepada Masyarakat	5
1.4 PkM Berbasis Kebutuhan dan Potensi Masyarakat	7
1.5 Masyarakat sebagai Subjek Pengabdian.....	8
1.6 Karakteristik Program PkM yang Berkualitas	10
1.7 Transformasi PkM: Dari Kegiatan Menuju Dampak.....	14
1.8 Landasan Hukum dan Kebijakan PkM di Indonesia	15
1.9 PkM dalam Perspektif Tridharma Perguruan Tinggi.....	16
1.10 Tantangan Kontemporer Pengabdian kepada Masyarakat	17
BAB 2 IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT	19
2.1 Konsep Identifikasi Masalah dan Analisis Kebutuhan.....	20
2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Masyarakat	21
2.3 Pemetaan Masalah dan Potensi Masyarakat	22
2.4 Analisis Kebutuhan dan Kesenjangan.....	23
2.5 Analisis Akar Masalah.....	25
2.6 Penentuan Prioritas Masalah.....	28
2.7 Penyusunan Baseline Program	29
2.8 Etika dalam Identifikasi Masalah dan Pengumpulan Data	31
2.9 Kesalahan Umum dalam Identifikasi Masalah dan Analisis Kebutuhan	32
2.10 Dari Analisis Kebutuhan Menuju Desain Program	32
BAB 3 DESAIN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	34
3.1 Konsep dan Prinsip Desain Program.....	34
3.2 Penentuan Tujuan dan Sasaran Program.....	36

3.3	Penyusunan Strategi dan Tahapan Kegiatan	37
3.4	Penentuan Indikator Keberhasilan	38
3.5	Penyusunan Logical Framework	39
3.6	Perencanaan Waktu, Sumber Daya, dan Anggaran.....	41
3.7	Penyusunan Rencana Keberlanjutan Program.....	43
3.8	Reviu dan Penyempurnaan Desain Program	44
3.9	Kesalahan Umum dalam Desain Program	45
3.10	Dari Desain Program Menuju Pemilihan Metodologi.....	46
BAB 4 PENDEKATAN DAN METODOLOGI PENGABDIAN MASYARAKAT		47
4.1	Konsep Metodologi Pengabdian Masyarakat.....	47
4.2	Pendekatan Partisipatif	48
4.3	Pendekatan Pemberdayaan.....	50
4.4	Pendekatan Kolaboratif dan Transformatif.....	51
4.5	Pendekatan Berbasis Masalah dan Kebutuhan	53
4.6	Pendekatan Berbasis Aset dan Potensi Lokal	54
4.7	Pemilihan Metode sesuai Karakteristik Program.....	55
4.8	Kombinasi dan Hibridisasi Metode dalam Praktik	57
4.9	Kesalahan Umum dalam Pemilihan Metodologi.....	58
4.10	Dari Pemilihan Metodologi Menuju Penerapan Metode Spesifik	58
BAB 5 PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR)		60
5.1	Konsep dan Prinsip PAR	60
5.2	Karakteristik PAR dalam Pengabdian	62
5.3	Siklus Perencanaan, Aksi, Observasi, dan Refleksi	63
5.4	Pelibatan Masyarakat dalam Proses PAR.....	65
5.5	Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Partisipatif.....	66
5.6	Implementasi PAR dalam Program PkM	67
5.7	Kelebihan, Keterbatasan, dan Contoh Penerapan PAR.....	68
5.8	Variasi Model PAR: dari Teknokratis hingga Emansipatoris	69
5.9	Kesalahan Umum dalam Penerapan PAR	70
5.10	Dari PAR Menuju ABCD: Memadukan Riset-Aksi dengan Aset	70
BAB 6 ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD) ...		72
6.1	Konsep dan Paradigma ABCD	72
6.2	Prinsip-Prinsip Pengembangan Berbasis Aset	73
6.3	Identifikasi dan Pemetaan Aset Masyarakat	74

6.4	Mobilisasi dan Pengembangan Aset Lokal	75
6.5	Perancangan Program Berbasis Aset	76
6.6	Implementasi ABCD dalam PkM	77
6.7	Kelebihan, Keterbatasan, dan Contoh Penerapan ABCD	78
6.8	Studi Kasus Penerapan ABCD di Berbagai Konteks	79
6.9	Kesalahan Umum dalam Penerapan ABCD	80
6.10	Dari ABCD Menuju PRA: Memperkaya Teknik Pemetaan Aset	81
BAB 7 PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL (PRA) DAN TEKNIK PARTISIPATIF		82
7.1	Konsep dan Prinsip PRA	82
7.2	Pemetaan Sosial dan Transect Walk	83
7.3	<i>Focus Group Discussion (FGD)</i>	84
7.4	Wawancara dan Observasi Partisipatif	85
7.5	<i>Problem Tree</i> dan Analisis Masalah	86
7.6	<i>Participatory Mapping</i> dan Teknik Visual	86
7.7	Pemilihan dan Penerapan Teknik PRA	87
7.8	Kombinasi Teknik PRA dalam Satu Siklus Kegiatan	88
7.9	Kesalahan Umum dalam Penerapan Teknik PRA	89
7.10	Dari Metode Menuju Strategi Pemberdayaan	90
BAB 8 STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT		91
8.1	Konsep dan Prinsip Pemberdayaan	91
8.2	Masyarakat sebagai Subjek dan Mitra	92
8.3	Strategi Pengembangan Kapasitas	93
8.4	Pelatihan, Pendampingan, Coaching, dan Mentoring	94
8.5	Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian	95
8.6	Strategi Perubahan dan Transformasi Masyarakat	96
8.7	Keberlanjutan dan <i>Exit Strategy</i>	97
8.8	Pengukuran Keberhasilan Pemberdayaan	97
8.9	Kesalahan Umum dalam Strategi Pemberdayaan	98
8.10	Dari Pemberdayaan Menuju Implementasi Program	98
BAB 9 IMPLEMENTASI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		100
9.1	Persiapan dan Pengorganisasian Program	100
9.2	Koordinasi dan Komunikasi dengan Mitra	101
9.3	Pembagian Peran dan Tanggung Jawab	102

9.4	Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan	103
9.5	Pengelolaan Sumber Daya dan Anggaran.....	104
9.6	Manajemen Risiko dan Adaptasi Program	104
9.7	Dokumentasi dan Pengendalian Mutu	105
9.8	Manajemen Konflik dalam Pelaksanaan Program.....	106
9.9	Kesalahan Umum dalam Implementasi Program.....	107
9.10	Dari Implementasi Menuju Monitoring dan Evaluasi	108
BAB 10 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM		
PENGABDIAN		109
10.1	Konsep dan Tujuan Monitoring dan Evaluasi.....	109
10.2	Monitoring Input dan Proses	110
10.3	Evaluasi <i>Output</i> dan <i>Outcome</i>	111
10.4	Penyusunan Indikator dan Instrumen Evaluasi.....	112
10.5	Teknik Pengukuran Perubahan	112
10.6	Analisis dan Interpretasi Hasil Evaluasi.....	113
10.7	Tindak Lanjut dan Perbaikan Program	115
10.8	Sistem Informasi Manajemen M&E.....	115
10.9	10.9 Kesalahan Umum dalam Monitoring dan Evaluasi.....	116
10.10	Dari Evaluasi Menuju Pengukuran Dampak.....	117
BAB 11 PENGUKURAN DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN		
PROGRAM		118
11.1	Konsep Dampak dalam Pengabdian kepada Masyarakat.....	118
11.2	<i>Output</i> , <i>Outcome</i> , dan <i>Impact</i>	119
11.3	Pengukuran Perubahan Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan	120
11.4	Pengukuran Dampak Sosial dan Ekonomi.....	121
11.5	Dokumentasi dan Pembuktian Dampak.....	122
11.6	Strategi Keberlanjutan dan Replikasi Program	123
11.7	Scaling Up dan Pengembangan Dampak.....	123
11.8	Pelaporan Dampak kepada Berbagai Pemangku Kepentingan	124
11.9	Kesalahan Umum dalam Pengukuran Dampak.....	124
11.10	Dari Dampak Menuju Kemitraan Berkelanjutan.....	125
BAB 12 KEMITRAAN, KOLABORASI, DAN EKOSISTEM		
PENGABDIAN		126
12.1	Konsep dan Prinsip Kemitraan.....	126
12.2	Identifikasi dan Pemetaan Stakeholder	127
12.3	Strategi Membangun Kolaborasi.....	128

12.4	Peran Perguruan Tinggi, Pemerintah, Dunia Usaha, dan Komunitas	129
12.5	Model Pentahelix dalam PkM.....	130
12.6	Pengelolaan dan Penguatan Jejaring Mitra	132
12.7	Pengembangan Ekosistem Pengabdian Berkelanjutan	132
12.8	Pendanaan Kolaboratif dan Kemitraan Multipihak	133
12.9	Kesalahan Umum dalam Membangun Kemitraan.....	134
12.10	Dari Kemitraan Menuju Akuntabilitas Akademik.....	134
BAB 13 PROPOSAL, LAPORAN, DAN PUBLIKASI HASIL		
PENGABDIAN		135
13.1	Struktur dan Sistematika Proposal PkM	135
13.2	Penyusunan Metode dan Rencana Pelaksanaan	137
13.3	Penyusunan Indikator dan Luaran Program	138
13.4	Penyusunan Laporan Hasil Pengabdian.....	139
13.5	Dokumentasi dan Bukti Kegiatan.....	140
13.6	Penulisan Artikel Ilmiah Hasil PkM	141
13.7	Publikasi dan Diseminasi Hasil Pengabdian.....	144
13.8	Kesalahan Umum dalam Penulisan Proposal, Laporan, dan Artikel.....	146
13.9	Memilih Jurnal dan Menghindari Jurnal Predator secara Praktis	146
13.10	Dari Publikasi Menuju Refleksi Etis.....	147
BAB 14 ETIKA, INOVASI, DAN TRANSFORMASI		
PENGABDIAN		148
14.1	Etika dalam Pengabdian kepada Masyarakat.....	148
14.2	Prinsip Kesetaraan, Inklusivitas, dan Perlindungan Masyarakat	149
14.3	Etika Data, Dokumentasi, dan Publikasi	150
14.4	Inovasi dalam Program Pengabdian	151
14.5	Transformasi Digital dalam PKM.....	152
14.6	PkM Berbasis Keberlanjutan dan SDGs.....	153
14.7	Masa Depan Pengabdian kepada Masyarakat.....	153
14.8	Kode Etik dan Organisasi Profesi PkM.....	154
14.9	Refleksi Kritis: Menjaga PKM Tetap Bermakna	154
14.10	Penutup: Merangkai Kembali Alur Besar Buku.....	155

DAFTAR PUSTAKA.....	156
GLOSARIUM.....	160
INDEKS.....	163
PROFIL PENULIS.....	164

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Paradigma Lama dan Paradigma Kontemporer dalam Pengabdian kepada Masyarakat	6
Tabel 3.1	Contoh Ilustratif Matriks Logical Framework Program Pemberdayaan UMKM Anyaman Bambu.....	39
Tabel 4.1	Perbandingan Lima Pendekatan Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat	55
Tabel 5.1	Kelebihan dan Keterbatasan Participatory Action Research dalam Konteks PkM	68
Tabel 6.1	Kelebihan dan Keterbatasan <i>Asset-Based Community Development</i> dalam Konteks PkM.....	78
Tabel 7.1	Perbandingan PAR, ABCD, dan PRA dalam Praktik Pengabdian kepada Masyarakat.....	87
Tabel 9.1	Contoh Ilustratif Matriks RACI Program Pemberdayaan UMKM Anyaman Bambu	102
Tabel 10.1	Enam Kriteria Evaluasi OECD-DAC untuk Analisis Program Pembangunan dan Pengabdian	114
Tabel 12.1	Matriks Kekuatan-Kepentingan untuk Pemetaan Stakeholder Program PkM	128
Tabel 13.1	Trik Praktis Penulisan Artikel PkM dari Judul hingga Kesimpulan.....	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Roda Karakteristik Program PkM Berkualitas: Tujuh Dimensi yang Saling Menopang Menuju Dampak	11
Gambar 2.1	Tujuh Langkah: dari Gejala Luas Menuju Baseline yang Fokus	19
Gambar 2.2	Struktur Pohon Masalah (Problem Tree): Akar, Batang, dan Dahan	26
Gambar 2.3	Model Gunung Es: Gejala di Permukaan dan Akar Masalah yang Tersembunyi.....	27
Gambar 3.1	Rantai Theory of Change: dari Input hingga Impact.....	35
Gambar 4.1	Tangga Partisipasi Arnstein: Delapan Tingkatan dalam Tiga Kelompok Besar	49
Gambar 5.1	Siklus Participatory Action Research: Perencanaan, Aksi, Observasi, dan Refleksi.....	63
Gambar 5.2	Spiral Iterasi PAR: Setiap Siklus Memperluas Pemahaman dan Cakupan Aksi	65
Gambar 6.1	Lima Kategori Aset Komunitas dalam Kerangka ABCD.....	74
Gambar 6.2	Alur Kerja ABCD: dari Discovery hingga Evaluasi dan Replikasi	77
Gambar 8.1	Tiga Level Pengembangan Kapasitas: Individu, Organisasi, dan Sistem.....	93
Gambar 12.1	Model Pentahelix dalam Ekosistem Pengabdian kepada Masyarakat	131
Gambar 13.1	Peta Alur Tujuh Komponen Inti Struktur Proposal PkM	136
Gambar 13.2	Alur Logika Penulisan Bagian Metode: Masalah → Pendekatan → Metode → Justifikasi	137
Gambar 13.3	Perbedaan Luaran Wajib dan Luaran Tambahan Program PkM.....	138
Gambar 13.4	Lima Komponen Struktur Laporan Hasil Pengabdian.....	139
Gambar 13.5	Daftar Periksa Lima Jenis Bukti Kegiatan PkM	140
Gambar 13.6	Struktur IMRaD untuk Artikel Ilmiah Hasil PkM.....	141
Gambar 13.7	Peta Alur Publikasi dan Diseminasi Hasil PkM, dengan Simpul Revisi Berulang.....	145
Gambar 14.1	Tiga Prinsip Etika Belmont dalam Konteks Pengabdian kepada Masyarakat	149

DAFTAR SINGKATAN

PkM	: Pengabdian kepada Masyarakat
PAR	: <i>Participatory Action Research</i>
ABCD	: <i>Asset-Based Community Development</i>
PRA	: <i>Participatory Rural Appraisal</i>
CBPR	: <i>Community-Based Participatory Research</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
USG	: <i>Urgency, Seriousness, Growth</i>
M&E	: Monitoring dan Evaluasi
IPTEKSB	: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Budaya
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i> (Nota Kesepahaman)
MoA	: <i>Memorandum of Agreement</i> (Perjanjian Kerja Sama)
RACI	: <i>Responsible, Accountable, Consulted, Informed</i>
OECD-DAC	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development, Development Assistance Committee</i>
MSC	: <i>Most Significant Change</i>
SROI	: <i>Social Return on Investment</i>
KAP	: <i>Knowledge, Attitude, Practice</i> (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan)
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
RAB	: Rencana Anggaran Biaya



BAB 1

KONSEP DAN PARADIGMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) sering diperlakukan sebagai kegiatan pelengkap dalam Tridharma Perguruan Tinggi, dilaksanakan setelah pengajaran dan penelitian selesai dijalankan. Cara pandang tersebut keliru secara konseptual maupun praktis. PkM bukan aktivitas residual, melainkan wahana penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKSB) yang mempertemukan dunia akademik dengan realitas sosial masyarakat secara kontekstual, kreatif, dan inovatif (Universitas Sanata Dharma, 2021). Bab ini membangun fondasi konseptual bagi keseluruhan buku dengan menjelaskan hakikat, tujuan, prinsip, paradigma, basis kebutuhan dan potensi, kedudukan masyarakat sebagai subjek, karakteristik program bermutu, serta arah transformasi PkM dari sekadar kegiatan menuju program yang berdampak.

1.1 KONSEP DAN HAKIKAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Secara etimologis, istilah “pengabdian” mengandung makna penghambaan, pelayanan, dan pemberian diri kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan setara. Dalam konteks perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat didefinisikan secara formal sebagai kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menegaskan bahwa PkM merupakan salah satu dari tiga pilar Tridharma yang wajib dilaksanakan secara terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian, bukan berdiri sendiri

sebagai kegiatan seremonial (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi [Kemdikbudristek], 2023).

Hakikat PkM tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif dosen. Nurdin (2023) menegaskan bahwa PkM pada dasarnya merupakan wujud tanggung jawab moral dan intelektual perguruan tinggi terhadap masyarakat yang telah memberikan ruang legitimasi bagi keberadaan institusi pendidikan tinggi itu sendiri. Argumentasi ini penting karena menempatkan relasi antara perguruan tinggi dan masyarakat bukan sebagai relasi donor–penerima, melainkan relasi resiprokal: masyarakat memberi ruang sosial dan sumber daya bagi keberlangsungan pendidikan tinggi, sedangkan perguruan tinggi berkewajiban mengembalikan manfaat keilmuan kepada masyarakat. Pemahaman ini juga ditegaskan oleh Alanur (2024), yang menjelaskan bahwa konsep dasar PkM tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial keilmuan yang melekat pada setiap disiplin akademik, sehingga setiap program pengabdian idealnya berangkat dari kompetensi keilmuan pelaksananya, bukan sekadar niat baik yang tidak berbasis keahlian.

Dari perspektif keilmuan pengembangan masyarakat (*community development*), pengabdian dapat dipahami sebagai proses terstruktur yang menghubungkan tiga unsur: pengetahuan ilmiah, kebutuhan riil masyarakat, dan mekanisme perubahan sosial yang terukur. Ansori et al. (2021) menyebut proses ini sebagai *university-community engagement*, yaitu keterlibatan resiprokal antara perguruan tinggi dan komunitas yang saling menguntungkan, bukan sekadar program karitatif satu arah. Konsep ini penting dibedakan dari sekadar “kegiatan sosial” atau “bakti sosial”, karena PkM akademik dituntut memiliki basis teori, metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta luaran yang terukur dan dapat direplikasi.

Berbeda dengan derma atau filantropi yang umumnya berhenti pada penyaluran bantuan material, PkM akademik mensyaratkan adanya proses diagnostik ilmiah terhadap persoalan masyarakat, perumusan intervensi berbasis bukti (*evidence-based intervention*), serta evaluasi terhadap perubahan yang dihasilkan. Karena itu, hakikat PkM lebih tepat dipahami sebagai riset terapan yang berorientasi aksi (*action-oriented applied research*), bukan semata kegiatan pengabdian dalam pengertian awam. Perbedaan ini dapat digambarkan melalui perbandingan dua situasi yang kerap dijumpai di lapangan: ketika sebuah tim dosen menghadapi desa yang sumber airnya tercemar, pendekatan karitatif akan berhenti pada pembagian alat penjernih air, sedangkan pendekatan akademik berbasis metodologi akan menempuh langkah yang lebih menyeluruh, yaitu melakukan uji

kualitas air, memetakan sumber pencemaran, melatih kader desa untuk memantau kualitas air secara mandiri, dan merancang sistem pengelolaan yang dapat dijalankan masyarakat secara berkelanjutan setelah tim pengabdian menyelesaikan tugasnya.

Implikasi dari pemahaman hakikat PkM sebagai riset terapan berorientasi aksi adalah tuntutan terhadap kompetensi pelaksana. Pelaksana PkM tidak cukup menguasai bidang keilmuan semata, tetapi juga harus memiliki kompetensi metodologis dalam merancang program, berkomunikasi dengan masyarakat, serta mengelola dinamika sosial yang seringkali tidak linear. Pemahaman ini menjadi dasar bagi pembahasan metodologi pada bab-bab selanjutnya.

Perbedaan cara pandang ini juga relevan diterapkan pada konteks kelembagaan pendidikan keagamaan seperti pesantren dan madrasah, yang selama ini kerap menjadi sasaran kegiatan bakti sosial tanpa basis diagnostik yang memadai. Sebuah pesantren yang menghadapi persoalan sanitasi santri, misalnya, akan menerima manfaat yang berbeda tergantung pendekatan yang digunakan: bantuan berupa perlengkapan mandi sekali pakai hanya menyelesaikan gejala sesaat, sedangkan pendekatan akademik berbasis metodologi akan menelusuri pola distribusi air bersih di lingkungan pesantren, kapasitas septic tank yang tersedia, serta kebiasaan santri dalam menjaga kebersihan, sebelum merumuskan intervensi teknis dan edukatif yang dirancang bersama pengurus pesantren agar dapat dipelihara secara mandiri setelah program berakhir. Prinsip yang sama berlaku pula pada UMKM, sekolah, maupun kelompok masyarakat perkotaan yang menjadi sasaran PkM, di mana kedalaman diagnosis awal senantiasa menentukan ketepatan dan keberlanjutan solusi yang dirumuskan.

1.2 TUJUAN DAN PRINSIP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan PkM dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan: tujuan akademik, tujuan sosial, dan tujuan kelembagaan. Pada tingkat akademik, PkM bertujuan menghasilkan penerapan dan pengujian ilmu pengetahuan dalam konteks nyata sehingga memperkaya keilmuan itu sendiri melalui umpan balik dari lapangan. Pada tingkat sosial, PkM bertujuan menyelesaikan atau mengurangi persoalan konkret yang dihadapi masyarakat, baik berupa persoalan ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, maupun sosial-budaya. Pada tingkat kelembagaan, PkM bertujuan memperkuat reputasi, jejaring, dan akuntabilitas sosial perguruan tinggi di hadapan publik (Kemdikbudristek, 2023).

Prinsip-prinsip pelaksanaan PkM yang dianut secara luas dalam literatur pengembangan masyarakat mencakup: (1) partisipasi, yakni pelibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan; (2) kesetaraan, yakni penempatan masyarakat sebagai mitra seajar dan bukan objek pasif; (3) keberlanjutan, yakni orientasi pada perubahan yang dapat dipertahankan setelah program berakhir; (4) akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban ilmiah dan sosial atas proses maupun hasil; serta (5) kepekaan kontekstual, yakni penyesuaian pendekatan dengan karakteristik sosial-budaya setempat. Murwati (2024) menambahkan bahwa dalam konteks Indonesia, prinsip partisipasi memiliki akar kultural yang kuat karena bertumpu pada nilai gotong royong yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat, sehingga pendekatan partisipatif pada dasarnya bukan sekadar metodologi impor, melainkan penguatan kembali kearifan kolektif yang telah dimiliki masyarakat Indonesia.

Lestari et al. (2022) melalui studi mengenai keterlibatan mitra pada program pengabdian masyarakat di perguruan tinggi Indonesia menemukan bahwa program-program yang melibatkan mitra secara intensif sejak tahap perencanaan menunjukkan tingkat keberlanjutan dan penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan program yang dirancang sepenuhnya oleh pihak kampus tanpa konsultasi mendalam dengan masyarakat sasaran. Temuan ini memperkuat argumen bahwa prinsip partisipasi bukan sekadar retorika normatif, melainkan faktor yang berasosiasi dengan efektivitas program.

Prinsip kesetaraan juga ditegaskan dalam kajian Kim (2021) mengenai kolaborasi universitas dan komunitas dalam konteks pencegahan kekerasan pada remaja, yang menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi lintas institusi sangat ditentukan oleh sejauh mana universitas bersedia menempatkan pengetahuan lokal komunitas setara dengan pengetahuan akademik, bukan menempatkannya sebagai pelengkap semata.

Dalam praktiknya, kelima prinsip tersebut sering berhadapan dengan tantangan struktural, misalnya keterbatasan waktu pelaksanaan yang terikat kalender akademik, ketimpangan relasi kuasa antara akademisi dan masyarakat, serta tekanan administratif untuk menghasilkan luaran dalam waktu singkat. Implikasinya, perancang program PkM perlu secara sadar mengalokasikan waktu untuk membangun kepercayaan (*trust building*) sebelum masuk ke tahap intervensi substantif, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada Bab 2 mengenai identifikasi masalah dan analisis kebutuhan.

Penerapan kelima prinsip ini juga perlu disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran yang berbeda-beda. Program yang menysasar kelompok pemuda desa, misalnya, menuntut strategi partisipasi yang berbeda dari program yang menysasar kelompok perempuan atau lanjut usia, mengingat perbedaan pola waktu luang, saluran komunikasi yang lazim digunakan, serta struktur kepemimpinan informal dalam masing-masing kelompok tersebut. Sebuah program pengabdian yang menysasar kelompok pemuda karang taruna, misalnya, akan lebih efektif membangun partisipasi melalui pendekatan berbasis media sosial dan forum diskusi santai, dibandingkan forum formal bergaya rapat desa konvensional yang lebih lazim digunakan untuk melibatkan kelompok tokoh masyarakat senior. Kepekaan semacam ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip PkM bersifat universal dalam substansinya, namun penerapannya senantiasa menuntut penyesuaian kontekstual yang cermat.

1.3 PARADIGMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Paradigma PkM mengalami pergeseran signifikan selama beberapa dekade terakhir. Paradigma lama memandang masyarakat sebagai pihak yang kekurangan (*deficit-based*) sehingga kehadiran perguruan tinggi diposisikan sebagai penyelamat yang membawa solusi dari luar. Paradigma ini kerap disebut sebagai model transfer teknologi (*technology transfer model*), di mana pengetahuan mengalir searah dari akademisi kepada masyarakat yang dianggap pasif sebagai penerima manfaat.

Paradigma kontemporer bergeser ke arah model *kemitraan* (*partnership model*) dan model pemberdayaan (*empowerment model*), di mana masyarakat diposisikan sebagai agen aktif yang memiliki pengetahuan, aset, dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Pergeseran ini sejalan dengan pemikiran Freire (1970) mengenai pendidikan pembebasan (*pedagogy of the oppressed*), yang mengkritik pendekatan pendidikan “gaya bank” (*banking concept of education*) di mana pengetahuan sekadar dideposit oleh pendidik kepada peserta didik yang pasif. Freire menawarkan model dialogis, di mana pengetahuan dibangun bersama melalui proses konsientisasi (*conscientization*), yaitu kesadaran kritis masyarakat terhadap kondisi sosialnya sendiri.

Selaras dengan itu, Chambers (1994) dalam kajiannya mengenai *participatory rural appraisal* menegaskan adanya pergeseran paradigma dari pembangunan yang berpusat pada pakar luar (*outsider-centred*) menuju pembangunan yang berpusat pada masyarakat lokal (*insider-centred*). Chambers berargumen bahwa masyarakat miskin dan terpinggirkan memiliki kapasitas analitis yang memadai untuk

memahami dan merumuskan solusi atas persoalan mereka sendiri, sehingga peran pihak luar semestinya bergeser dari pemberi solusi menjadi fasilitator proses (Chambers, 1994, 1997).

Pergeseran paradigma tersebut juga tampak dalam konteks pengabdian berbasis nilai keagamaan di Indonesia. Kajian metodologi pengabdian berbasis *Participatory Action Research* (PAR) menegaskan bahwa dalam paradigma PAR, masyarakat merupakan agen utama perubahan, sedangkan dosen dan mahasiswa pelaksana berperan sebagai fasilitator dari proses perubahan tersebut, bukan sebagai pihak yang menentukan arah perubahan secara sepihak (Afandi, 2022).

Tabel 1. 1 Perbandingan Paradigma Lama dan Paradigma Kontemporer dalam Pengabdian kepada Masyarakat

Dimensi	Paradigma Lama (<i>Deficit-Based</i>)	Paradigma Kontemporer (<i>Asset/Empowerment-Based</i>)
Posisi masyarakat	Objek penerima bantuan	Subjek dan mitra sejajar
Titik tolak	Masalah dan kekurangan	Aset, potensi, dan kapasitas lokal
Arah pengetahuan	Searah, dari akademisi ke masyarakat	Dialogis dan koproduksi pengetahuan
Peran akademisi	Penyedia solusi	Fasilitator proses perubahan
Orientasi hasil	Output kegiatan	Outcome dan keberlanjutan

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan Chambers (1994, 1997), Freire (1970), dan Afandi (2022).

Perlu ditegaskan bahwa pergeseran paradigma tersebut bersifat gradual dan kontekstual, bukan penggantian total. Dalam kondisi darurat kemanusiaan, misalnya pascabencana, pendekatan yang lebih direktif dan berbasis pemenuhan kebutuhan dasar tetap relevan pada tahap awal, sebelum secara bertahap

bertransisi ke pendekatan partisipatif pada tahap pemulihan dan pembangunan kembali. Dengan demikian, pemilihan paradigma perlu mempertimbangkan karakteristik situasi, bukan diterapkan secara dogmatis.

1.4 PKM BERBASIS KEBUTUHAN DAN POTENSI MASYARAKAT

Dua basis utama yang lazim digunakan dalam merancang program PkM adalah pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based approach*) dan pendekatan berbasis aset (*asset-based approach*). Pendekatan berbasis kebutuhan berangkat dari identifikasi masalah, kesenjangan, dan kekurangan yang dihadapi masyarakat, kemudian merumuskan intervensi untuk mengatasinya. Pendekatan ini efektif untuk persoalan yang bersifat teknis dan mendesak, misalnya wabah penyakit, kerusakan infrastruktur, atau krisis pangan, karena memberikan kerangka diagnostik yang jelas dan terukur.

Pendekatan berbasis aset, sebagaimana dirumuskan oleh Kretzmann dan McKnight (1993) melalui konsep *Asset-Based Community Development* (ABCD), menawarkan cara pandang berbeda. Alih-alih memulai dari pertanyaan “apa yang kurang dari masyarakat ini”, pendekatan ABCD memulai dari pertanyaan “aset dan potensi apa yang sudah dimiliki masyarakat ini”. Kretzmann dan McKnight (1993) mengidentifikasi lima kategori aset komunitas: aset individu (keterampilan dan bakat warga), aset asosiasi (organisasi warga dan kelompok informal), aset institusi lokal (sekolah, puskesmas, koperasi), aset fisik (lahan, bangunan, infrastruktur), serta aset ekonomi lokal (usaha kecil dan potensi pasar). Aryawati (2024) menambahkan bahwa pendekatan berbasis kebutuhan yang tidak diimbangi dengan pemetaan aset berisiko menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar, sekaligus kurang mengoptimalkan potensi yang sesungguhnya sudah dimiliki masyarakat itu sendiri.

Argumen utama pendekatan berbasis aset adalah bahwa pendekatan berbasis kebutuhan yang dijalankan tanpa kehati-hatian berisiko menciptakan ketergantungan (*dependency syndrome*) dan memperkuat citra diri masyarakat sebagai pihak yang tidak berdaya. Sebaliknya, dengan memulai dari aset yang sudah dimiliki, masyarakat dibangun kepercayaan dirinya untuk menjadi pelaku utama perubahan, sementara sumber daya dari luar berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu (Kretzmann & McKnight, 1993).

Kedua pendekatan ini sesungguhnya tidak bersifat dikotomis, melainkan saling melengkapi. Dalam praktik metodologis kontemporer, banyak pelaksana PkM menggabungkan keduanya: analisis kebutuhan digunakan untuk memahami

persoalan yang dihadapi, sedangkan pemetaan aset digunakan untuk merumuskan strategi penyelesaiannya, sehingga solusi yang dihasilkan bertumpu pada kapasitas yang sudah tersedia di masyarakat, bukan semata bergantung pada sumber daya eksternal. Chamidi et al. (2023) dalam kajian mengenai pendekatan ABCD dan manajemen menekankan bahwa keberhasilan pendekatan berbasis aset sangat ditentukan oleh ketepatan proses pemetaan aset pada tahap awal program, yang akan dibahas secara lebih rinci pada Bab 6. Penggabungan kedua pendekatan tersebut dapat digambarkan melalui situasi yang lazim dijumpai pada kelurahan padat penduduk di kawasan perkotaan, ketika warga menghadapi persoalan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai basis kebutuhan yang mendesak untuk diatasi. Alih-alih hanya menyediakan tempat sampah sebagai respons teknis semata, tim pengabdian yang bekerja secara metodologis akan memetakan potensi kelompok warga yang sudah memiliki pengalaman mengelola kegiatan bersama, misalnya kelompok arisan atau kelompok sosial ibu-ibu, sebagai basis aset yang kemudian dikembangkan kapasitasnya menjadi unit pengelola bank sampah berbasis komunitas, sehingga solusi yang dihasilkan tumbuh dari kapasitas yang sudah ada, bukan semata bergantung pada bantuan dari luar.

Ilustrasi lain yang memperjelas penggabungan kedua basis ini dapat ditemukan pada konteks sekolah dasar di wilayah pedesaan yang menghadapi rendahnya minat baca siswa (basis kebutuhan). Alih-alih semata mendatangkan buku bacaan baru dari luar, tim pengabdian yang bekerja secara metodologis akan terlebih dahulu memetakan potensi yang telah dimiliki sekolah dan masyarakat sekitarnya, misalnya keberadaan alumni yang bekerja di bidang literasi, orang tua siswa yang memiliki keterampilan mendongeng, atau ruang kosong di balai desa yang dapat difungsikan sebagai sudut baca. Kombinasi antara pemenuhan kebutuhan mendasar (penambahan koleksi buku yang relevan) dan mobilisasi aset lokal (pelibatan alumni dan orang tua sebagai relawan literasi) menghasilkan program yang secara bersamaan menjawab kesenjangan riil sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan komunitas terhadap keberlangsungan program tersebut.

1.5 MASYARAKAT SEBAGAI SUBJEK PENGABDIAN

Penempatan masyarakat sebagai subjek, bukan objek, pengabdian merupakan konsekuensi logis dari pergeseran paradigma yang telah dibahas sebelumnya. Sebagai subjek, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam

menentukan agenda, memilih metode, serta menilai keberhasilan program yang menyangkut kehidupan mereka sendiri. Ansori et al. (2021) menegaskan bahwa *university-community engagement* yang otentik mensyaratkan relasi timbal balik, di mana perguruan tinggi tidak hanya memberi tetapi juga belajar dari pengetahuan lokal, kearifan tradisional, dan pengalaman hidup masyarakat.

Secara teoretis, penempatan masyarakat sebagai subjek berakar pada konsep konsientisasi Freire (1970), yang menekankan bahwa perubahan sosial yang otentik hanya dapat terjadi ketika masyarakat menyadari secara kritis posisi dan kondisi mereka sendiri, bukan sekadar menerima definisi masalah yang dirumuskan oleh pihak luar. Ketika masyarakat hanya diposisikan sebagai objek penerima program, perubahan yang dihasilkan cenderung bersifat artifisial dan tidak bertahan setelah program berakhir, karena rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program tidak pernah terbentuk.

Namun, penempatan masyarakat sebagai subjek juga perlu diperlakukan secara kritis, tidak romantik. Dalam kenyataan, masyarakat bukan entitas homogen; terdapat perbedaan kepentingan, akses, dan kekuasaan di antara kelompok-kelompok di dalamnya, misalnya antara laki-laki dan perempuan, generasi tua dan muda, atau kelompok mampu dan kelompok rentan. Chambers (1997) mengingatkan bahwa proses partisipatif yang tidak dirancang secara cermat berisiko didominasi oleh elite lokal (*elite capture*), sehingga suara kelompok rentan justru semakin terpinggirkan meskipun label “partisipatif” tetap disematkan pada program tersebut.

Implikasi metodologis dari kesadaran ini adalah perlunya desain proses pelibatan yang secara sengaja membuka ruang bagi kelompok yang selama ini kurang terwakili, misalnya melalui forum terpisah untuk perempuan, pemuda, atau kelompok difabel, sebelum forum tersebut disatukan dalam pengambilan keputusan bersama. Teknik-teknik partisipatif untuk memastikan keterwakilan tersebut akan dibahas lebih rinci pada Bab 7 mengenai *Participatory Rural Appraisal* dan teknik partisipatif lainnya.

Kedudukan masyarakat sebagai subjek juga menuntut kejelasan mengenai batas kewenangan yang sesungguhnya dimiliki masyarakat dalam suatu program PkM, agar harapan yang dibangun tidak melampaui apa yang dapat direalisasikan. Sebagai gambaran, dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, warga dapat diberi kewenangan penuh untuk menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan dan pembagian hasil di antara anggota kelompok, namun keputusan mengenai alokasi dana hibah dari pemerintah tetap perlu mengikuti

ketentuan yang telah ditetapkan pemberi dana. Kejujuran mengenai batas kewenangan semacam ini, disampaikan secara terbuka sejak awal program, mencegah kekecewaan masyarakat di kemudian hari sekaligus menjaga kredibilitas tim pengabdian sebagai mitra yang dapat dipercaya.

1.6 KARAKTERISTIK PROGRAM PKM YANG BERKUALITAS

Berdasarkan sintesis dari berbagai kajian yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, dapat dirumuskan tujuh karakteristik program PkM yang berkualitas. Ketujuh karakteristik ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling menopang satu sama lain dan bermuara pada satu titik capaian yang sama, yaitu program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Kedudukan dan keterkaitan ketujuh karakteristik tersebut digambarkan pada bagan berikut, sebelum masing-masing diuraikan secara lebih mendalam.



Gambar 1. 1 Roda Karakteristik Program PkM Berkualitas: Tujuh Dimensi yang Saling Menopang Menuju Dampak

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan Kemdikbudristek (2023), Lestari et al. (2022), dan Alanur (2024).

1. Berbasis Bukti (*Evidence-Based*)

Karakteristik pertama menuntut agar setiap program PkM dirancang berdasarkan data dan analisis kebutuhan yang valid, bukan berdasarkan asumsi sepihak pelaksana maupun kebiasaan program tahun-tahun sebelumnya yang diulang tanpa evaluasi. Basis bukti dapat diperoleh melalui data sekunder dari pemerintah desa atau kelurahan, hasil survei pendahuluan, wawancara dengan tokoh masyarakat, maupun kajian literatur mengenai persoalan serupa di wilayah lain. Kemdikbudristek (2023) menegaskan bahwa proposal PkM yang bermutu semestinya menyertakan analisis situasi yang didukung data, bukan sekadar narasi umum mengenai pentingnya suatu kegiatan. Tanpa basis bukti yang memadai, program

berisiko salah sasaran, misalnya memberikan pelatihan yang sebenarnya tidak dibutuhkan masyarakat atau mengulang program yang sudah pernah dilaksanakan pihak lain tanpa hasil yang optimal.

2. Partisipatif

Karakteristik kedua menuntut pelibatan masyarakat sasaran secara aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, bukan hanya sebagai pelaksana teknis di lapangan pada saat kegiatan berlangsung. Partisipasi yang otentik berbeda dari partisipasi simbolik yang sekadar menghadirkan warga sebagai peserta tanpa memberi ruang bagi mereka untuk memengaruhi keputusan. Sebagaimana telah diuraikan pada Subbab 1.2, prinsip ini bertumpu pada nilai gotong royong yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia (Murwati, 2024), sehingga penerapannya semestinya tidak dirasakan sebagai metodologi asing, melainkan penguatan terhadap kebiasaan kolektif yang sudah ada. Program yang partisipatif ditandai oleh adanya forum musyawarah pada tahap perencanaan, keterlibatan warga dalam pelaksanaan, serta ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan penilaian terhadap hasil program.

3. Relevan secara Kontekstual

Karakteristik ketiga menuntut agar program mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan geografis masyarakat sasaran secara spesifik, bukan menerapkan model program yang seragam di berbagai lokasi tanpa penyesuaian. Sebuah program pemberdayaan ekonomi yang berhasil di wilayah pesisir belum tentu relevan diterapkan tanpa modifikasi di wilayah pegunungan, karena perbedaan mata pencaharian, struktur sosial, dan akses pasar. Kepekaan kontekstual juga mencakup penghormatan terhadap norma dan kearifan lokal, misalnya struktur kepemimpinan adat, kalender pertanian, atau nilai-nilai keagamaan setempat, yang apabila diabaikan dapat menimbulkan resistensi meskipun secara teknis program tersebut dirancang dengan baik.

4. Memiliki Kerangka Logis yang Jelas

Karakteristik keempat menuntut adanya keterkaitan yang runtut antara input, aktivitas, output, outcome, dan dampak yang diharapkan, sehingga hubungan sebab-akibat dalam program dapat direncanakan sejak awal dan bukan diklaim secara retrospektif setelah kegiatan selesai. Kerangka logis yang jelas memudahkan tim pengabdian maupun pemberi dana untuk menilai apakah aktivitas yang dirancang benar-benar akan menghasilkan

perubahan yang diharapkan, atau sekadar menghasilkan kesibukan tanpa arah yang terukur. Penyusunan kerangka logis (*logical framework*) secara lebih teknis akan dibahas pada Bab 3 mengenai desain program.

5. Terukur

Karakteristik kelima menuntut adanya indikator keberhasilan yang dapat diverifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga klaim keberhasilan program tidak bertumpu pada kesan subjektif pelaksana semata. Indikator yang baik bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai secara realistis, relevan dengan tujuan program, dan memiliki batas waktu yang jelas. Keterukuran ini menjadi prasyarat bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang akan dibahas secara mendalam pada Bab 10, sekaligus menjadi dasar bagi pembuktian dampak yang dibahas pada Bab 11.

6. Berorientasi Keberlanjutan

Karakteristik keenam menuntut agar program dirancang dengan strategi keluar (*exit strategy*) yang jelas sejak awal, agar manfaat program dapat dipertahankan oleh masyarakat setelah masa pendampingan tim pengabdian berakhir. Banyak program PkM yang secara teknis berhasil selama masa pelaksanaan, namun manfaatnya menghilang begitu tim pengabdian meninggalkan lokasi, karena keberlanjutan tidak dirancang secara sengaja, misalnya melalui penguatan kelembagaan lokal, transfer keterampilan pengelolaan, atau penyiapan kader masyarakat yang akan melanjutkan program secara mandiri.

7. Kolaboratif dan Multipihak

Karakteristik ketujuh menuntut adanya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas sesuai kebutuhan program, karena persoalan masyarakat kontemporer umumnya bersifat kompleks dan lintas sektor sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Kolaborasi multipihak memungkinkan pembagian peran yang saling melengkapi: perguruan tinggi menyumbang basis keilmuan dan metodologi, pemerintah menyediakan dukungan regulasi dan sumber daya, dunia usaha berkontribusi melalui pendanaan atau akses pasar, sedangkan komunitas menjadi pelaku utama yang menjalankan dan memelihara program. Pembahasan lebih rinci mengenai model kolaborasi multipihak, termasuk model pentahelix, disajikan pada Bab 12.

Ketujuh karakteristik tersebut, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1, tidak berfungsi secara terpisah melainkan saling menopang:

program yang berbasis bukti namun tidak partisipatif berisiko kehilangan legitimasi sosial; program yang partisipatif namun tidak terukur akan sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah; sementara program yang terukur namun tidak berorientasi keberlanjutan hanya akan menghasilkan perubahan yang bersifat sementara. Kualitas program karena itu perlu dinilai secara menyeluruh dari sisi proses maupun hasil, bukan dari salah satu dimensi semata. Evaluasi proses dan evaluasi hasil perlu dijalankan secara beriringan, sebagaimana akan dibahas secara mendalam pada Bab 10.

1.7 TRANSFORMASI PKM: DARI KEGIATAN MENUJU DAMPAK

Salah satu kritik paling mendasar terhadap praktik pengabdian di banyak perguruan tinggi adalah kecenderungan berhenti pada pengukuran output, yaitu jumlah kegiatan yang terlaksana, jumlah peserta yang hadir, atau jumlah produk yang dihasilkan, tanpa menelusuri lebih jauh apakah kegiatan tersebut menghasilkan perubahan nyata (*outcome*) dan dampak jangka panjang (*impact*) bagi masyarakat sasaran. Transformasi orientasi dari sekadar “kegiatan terlaksana” menuju “dampak terbukti” merupakan agenda sentral yang melandasi keseluruhan buku ini.

Transformasi ini menuntut perubahan pada beberapa level sekaligus. Pada level konseptual, pelaksana perlu memahami perbedaan mendasar antara output, outcome, dan impact sebagai tiga lapis hasil yang berbeda cakupan waktu dan kedalamannya, yang akan dibahas secara rinci pada Bab 11. Pada level metodologis, perancangan program perlu menggunakan kerangka kerja logis (*logical framework*) sejak awal, sehingga hubungan sebab-akibat antara aktivitas dan dampak dapat direncanakan dan diverifikasi, bukan diklaim secara retrospektif tanpa dasar. Pada level kelembagaan, lembaga pengabdian perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, bukan hanya pada saat pelaporan akhir kegiatan.

Pergeseran menuju orientasi dampak juga sejalan dengan tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi terhadap penggunaan sumber daya negara maupun institusi untuk kegiatan pengabdian. Ketika PkM mampu menunjukkan dampak yang terukur dan terdokumentasi dengan baik, posisi tawar perguruan tinggi dalam membangun kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga donor turut menguat, sebagaimana akan dielaborasi pada Bab 12 mengenai kemitraan dan ekosistem pengabdian.

Dengan demikian, seluruh pembahasan pada bab-bab berikutnya dalam buku ini mulai dari identifikasi masalah, desain program, pemilihan metodologi, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi perlu dipahami sebagai satu rangkaian yang koheren menuju satu tujuan akhir: memastikan bahwa pengabdian kepada masyarakat benar-benar menghasilkan perubahan yang bermakna, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang dilayani.

Sebagai penutup bab ini, perlu ditegaskan bahwa transformasi menuju orientasi dampak bukanlah proses yang dapat dicapai secara instan oleh satu program atau satu tim pengabdian semata, melainkan menuntut perubahan budaya kelembagaan secara menyeluruh di tingkat perguruan tinggi. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi ini, misalnya melalui penyediaan pelatihan metodologi bagi dosen, pengembangan sistem basis data program dan mitra yang terpadu, serta pemberian insentif bagi program yang mampu menunjukkan bukti dampak yang kredibel, bukan semata insentif berdasarkan jumlah kegiatan yang terlaksana. Tiga subbab penutup berikut melengkapi fondasi konseptual bab ini dengan meninjau landasan hukum, kedudukan PkM dalam Tridharma secara lebih mendalam, serta tantangan kontemporer yang perlu diantisipasi sebelum pembahasan pada Bab 2 memulai penerapan gagasan-gagasan ini secara operasional.

1.8 LANDASAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PKM DI INDONESIA

Kedudukan PkM sebagai kewajiban akademik yang setara dengan pendidikan dan penelitian tidak semata bersifat normatif, melainkan memiliki landasan hukum yang eksplisit dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia. Selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah disinggung pada Subbab 1.1, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma. Ketentuan ini menempatkan standar pengabdian setara secara hukum dengan standar penelitian, bukan sebagai pelengkap yang standarnya lebih longgar.

Perkembangan regulasi selanjutnya menunjukkan arah penyederhanaan yang memberi ruang lebih besar bagi inovasi perguruan tinggi. Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023) melalui Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyederhanakan delapan standar pengabdian yang sebelumnya diatur secara rinci menjadi tiga standar utama, dengan tata kelola penjaminan mutu mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar). Penyederhanaan ini mencerminkan pergeseran filosofi regulasi dari kepatuhan administratif yang kaku menuju akuntabilitas berbasis hasil, sejalan dengan agenda transformasi PkM menuju orientasi dampak yang telah dibahas pada Subbab 1.7.

Implikasi praktis dari kerangka regulasi ini bagi pelaksana PkM adalah pentingnya memahami bahwa kewajiban pengabdian bukan sekadar tuntutan administratif kepangkatan dosen, melainkan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara nasional yang diaudit dan dievaluasi secara berkala. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di setiap perguruan tinggi bertanggung jawab menerjemahkan regulasi nasional ini ke dalam panduan operasional yang lebih rinci, sebagaimana dicontohkan oleh Kemdikbudristek (2023) melalui panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dirujuk berulang kali sepanjang buku ini.

1.9 PKM DALAM PERSPEKTIF TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Meskipun ditetapkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, ketiga pilar Tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam praktiknya sering dijalankan secara terpisah oleh dosen yang berbeda atau bahkan oleh dosen yang sama namun tanpa keterkaitan substantif antarketiganya. Integrasi Tridharma yang otentik menuntut ketiga pilar tersebut saling memperkuat: penelitian menghasilkan pengetahuan baru yang mendasari materi pengajaran maupun program pengabdian, pengabdian menghasilkan data dan persoalan lapangan yang memperkaya penelitian dan pengajaran, sedangkan pendidikan mempersiapkan mahasiswa untuk terlibat secara kompeten dalam penelitian dan pengabdian.

Model integrasi yang paling lazim diterapkan di perguruan tinggi Indonesia adalah pelibatan mahasiswa dalam program PkM dosen sebagai bagian dari mata kuliah tertentu, misalnya Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik atau mata kuliah berbasis proyek yang menugaskan mahasiswa turun langsung ke masyarakat. Model integrasi yang lebih mendalam menghubungkan topik penelitian dosen

dengan program pengabdian yang dilaksanakan, sehingga temuan penelitian diuji dan diterapkan langsung dalam konteks nyata melalui PkM, sekaligus menghasilkan data lapangan yang dapat memperkaya penelitian lanjutan sebuah siklus yang sejalan dengan pemahaman PkM sebagai riset terapan berorientasi aksi yang telah ditegaskan pada Subbab 1.1.

Kegagalan mengintegrasikan ketiga pilar Tridharma secara substantif berisiko menghasilkan dosen yang kompeten pada satu pilar namun lemah pada pilar lainnya, misalnya peneliti handal yang tidak pernah menerjemahkan temuannya ke dalam manfaat langsung bagi masyarakat, atau pelaksana PkM yang aktif namun tidak pernah mendokumentasikan pembelajarannya ke dalam publikasi ilmiah sebagaimana akan dibahas pada Bab 13. Perguruan tinggi yang mendorong integrasi ketiga pilar secara sengaja misalnya melalui skema pendanaan yang mensyaratkan keterkaitan eksplisit antara proposal penelitian dan pengabdian cenderung menghasilkan ekosistem akademik yang lebih produktif dan berdampak dibandingkan perguruan tinggi yang membiarkan ketiganya berjalan sendiri-sendiri.

1.10 TANTANGAN KONTEMPORER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Praktik PkM di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan struktural yang perlu disadari sejak awal oleh pembaca buku ini, sebelum mempelajari metodologi yang lebih teknis pada bab-bab berikutnya. Tantangan pertama adalah sistem insentif akademik yang seringkali masih menempatkan penelitian dan publikasi sebagai indikator utama kinerja dosen, sementara pengabdian dinilai sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif dengan bobot yang jauh lebih rendah dalam penilaian kinerja maupun kenaikan pangkat, meskipun secara regulasi sebagaimana dibahas pada Subbab 1.8 kedudukannya setara.

Tantangan kedua adalah keterbatasan kapasitas metodologis pelaksana PkM, terutama dosen muda yang belum banyak terpapar pelatihan metodologi pengabdian yang sistematis, sehingga cenderung mengulang pola kegiatan seremonial tanpa basis bukti yang memadai sebagaimana telah dikritik pada Subbab 1.1. Buku referensi ini disusun untuk turut menjawab tantangan tersebut, namun literatur semacam ini perlu dilengkapi dengan pelatihan praktis dan pendampingan langsung di lapangan agar penguasaan metodologi benar-benar terinternalisasi, bukan sekadar pengetahuan teoretis.

Tantangan ketiga adalah kesenjangan digital dan infrastruktur yang masih nyata di sebagian wilayah Indonesia, sebagaimana akan dibahas lebih mendalam pada Subbab 14.5, yang membatasi penerapan teknik-teknik pengumpulan data maupun intervensi berbasis digital di wilayah dengan akses internet dan listrik yang terbatas. Tantangan keempat adalah keberlanjutan pendanaan, di mana banyak program PkM yang bergantung sepenuhnya pada skema hibah tahunan tanpa strategi keberlanjutan finansial jangka panjang sebagaimana telah ditekankan pada Subbab 3.7, sehingga manfaat program berisiko terhenti begitu periode pendanaan berakhir.

Kesadaran terhadap keempat tantangan ini penting bukan untuk menimbulkan pesimisme, melainkan untuk membekali pembaca dengan ekspektasi yang realistis sekaligus strategi antisipatif sejak tahap perencanaan program. Pembahasan mengenai desain program pada Bab 3, pemilihan metodologi pada Bab 4 hingga 7, serta strategi keberlanjutan dan kemitraan pada Bab 8 dan 12 secara khusus dirancang untuk membekali pembaca dengan alat bantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara sistematis.



BAB 2

IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISIS KEBUTUHAN MASYARAKAT

Sebagaimana ditegaskan pada Bab 1, karakteristik pertama program PkM yang berkualitas adalah keberbasian pada bukti (*evidence-based*). Bukti tersebut tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dihasilkan melalui rangkaian proses identifikasi masalah dan analisis kebutuhan yang sistematis. Bab ini menguraikan tahapan tersebut secara berurutan: dari mengenali kesenjangan, mengumpulkan data, memetakan masalah dan potensi, menganalisis kebutuhan, menelusuri akar masalah, menetapkan prioritas, hingga menyusun baseline sebagai titik tolak pengukuran keberhasilan program pada tahap-tahap selanjutnya.



Gambar 2. 1 Tujuh Langkah: dari Gejala Luas Menuju Baseline yang Fokus

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan Witkin & Altschuld (1995) dan Kusek & Rist (2004).

2.1 KONSEP IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISIS KEBUTUHAN

Identifikasi masalah dan analisis kebutuhan sering dianggap sebagai satu aktivitas yang sama, padahal keduanya memiliki penekanan yang berbeda meskipun saling terkait erat. Identifikasi masalah menitikberatkan pada pengenalan gejala atau persoalan yang dirasakan masyarakat, sedangkan analisis kebutuhan merupakan proses yang lebih sistematis untuk mengukur, memverifikasi, dan memprioritaskan kesenjangan tersebut sebelum dirumuskan menjadi rancangan intervensi. Witkin dan Altschuld (1995) mendefinisikan kebutuhan (*need*) secara presisi sebagai kesenjangan antara “kondisi yang ada” (*what is*) dan “kondisi yang seharusnya” (*what should be*). Definisi ini penting karena menegaskan bahwa kebutuhan bukanlah semata daftar keinginan (*want*), melainkan selisih terukur antara realitas saat ini dan kondisi ideal yang disepakati bersama.

Secara teoretis, pemahaman mengenai kebutuhan manusia tidak dapat dilepaskan dari teori hierarki kebutuhan Maslow (1943), yang membedakan kebutuhan dasar bersifat fisiologis dan keamanan dari kebutuhan yang lebih tinggi seperti rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. Relevansi teori ini bagi PkM terletak pada peringatannya agar pelaksana tidak mereduksi kebutuhan masyarakat semata pada aspek material atau ekonomi. Sebuah komunitas yang secara ekonomi telah tercukupi kebutuhan dasarnya dapat saja memiliki kebutuhan mendesak pada aspek lain, misalnya pengakuan sosial, ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan, atau penguatan identitas budaya, yang apabila diabaikan akan membuat program PkM terasa tidak relevan meskipun secara teknis telah “membantu” masyarakat.

Argumentasi metodologis yang perlu digarisbawahi adalah bahwa identifikasi masalah tanpa dilanjutkan dengan analisis kebutuhan yang memadai berisiko menghasilkan program yang responsif terhadap gejala, tetapi tidak menyentuh persoalan yang sesungguhnya. Sebagai gambaran, keluhan warga mengenai tingginya angka putus sekolah dapat berhenti ditafsirkan sebagai kebutuhan akan beasiswa semata, padahal setelah dianalisis lebih jauh, kesenjangan yang sesungguhnya bisa jadi terletak pada jarak tempuh sekolah, pola kerja anak dalam membantu ekonomi keluarga, atau persepsi orang tua terhadap manfaat pendidikan lanjutan, sehingga solusi yang tepat sasaran akan sangat berbeda dari solusi yang dirancang berdasarkan asumsi awal.

Implikasi dari pembedaan konseptual ini adalah bahwa setiap program PkM idealnya melalui dua tahap berpikir yang berurutan: mengenali gejala yang tampak

di permukaan, kemudian menelusurinya secara sistematis hingga menemukan kebutuhan yang sesungguhnya melandasi gejala tersebut. Kerangka berpikir ini menjadi dasar bagi keseluruhan pembahasan pada subbab-subbab berikutnya.

2.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI MASYARAKAT

Pengumpulan data merupakan prasyarat mutlak bagi identifikasi masalah yang valid. Secara umum, data yang dikumpulkan dapat dibedakan menjadi data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara, observasi, atau survei, dan data sekunder, yaitu data yang telah tersedia sebelumnya dari sumber seperti profil desa atau kelurahan, data Badan Pusat Statistik, laporan puskesmas, atau dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kombinasi keduanya memberikan gambaran yang lebih utuh dibandingkan hanya mengandalkan salah satu jenis data.

Chambers (1994, 1997) menekankan pentingnya teknik pengumpulan data yang bersifat partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi sumber data yang diwawancarai secara pasif, tetapi turut terlibat dalam proses pengumpulan dan penafsiran data itu sendiri. Teknik semacam wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), dan observasi partisipatif memungkinkan pelaksana PkM menangkap perspektif emik, yaitu cara pandang masyarakat terhadap persoalannya sendiri, yang seringkali berbeda dari perspektif etik atau cara pandang pihak luar yang terbiasa menggunakan kerangka teori akademik semata. Ansori et al. (2021) menambahkan bahwa dalam praktik *university-community engagement*, ketepatan memilih teknik pengumpulan data turut ditentukan oleh tingkat kepercayaan yang telah terbangun antara tim pengabdian dan masyarakat, sehingga pada tahap awal keterlibatan, teknik observasi dan perbincangan informal seringkali lebih efektif dibandingkan instrumen survei yang formal dan berjarak.

Validitas data yang dikumpulkan dapat diperkuat melalui triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber, metode, maupun waktu pengumpulan yang berbeda. Sebagai gambaran, keluhan seorang tokoh masyarakat mengenai minimnya akses air bersih di suatu dusun akan lebih kredibel apabila dikonfirmasi melalui observasi langsung terhadap kondisi sumber air, wawancara dengan beberapa rumah tangga di lokasi berbeda, dan data sekunder dari dinas terkait, dibandingkan hanya bertumpu pada pernyataan satu narasumber semata. Prinsip triangulasi ini penting untuk menghindari bias

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2022). Metodologi pengabdian masyarakat. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Alanur, S. N. (2024). Konsep dasar dan prinsip pengabdian kepada masyarakat. In U. Khasanah, S. N. I. Trisnawati, A. Isma, A. N. Maida, N. P. P. E. Nainiti, L. H. Amin, N. P. A. Aryawati, Murwati, H. Bangu, & C. Maulida, Metodologi pengabdian kepada masyarakat: Teori dan implementasi (pp. 52–66). Tahta Media Group.
- Ansori, M., Afandi, A., Fitriyah, R. D., Safriyani, R., & Farisia, H. (2021). Pendekatan-pendekatan dalam university-community engagement. UIN Sunan Ampel Press.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Aryawati, N. P. A. (2024). Metode ABCD (Asset-Based Community Development). In U. Khasanah et al., Metodologi pengabdian kepada masyarakat: Teori dan implementasi. Tahta Media Group.
- Bangu, H. (2024). Pengembangan kapasitas dan keberlanjutan program. In U. Khasanah et al., Metodologi pengabdian kepada masyarakat: Teori dan implementasi (pp. 144–156). Tahta Media Group.
- Bradshaw, J. (1972). Taxonomy of social need. In G. McLachlan (Ed.), *Problems and progress in medical care* (pp. 71–82). Oxford University Press.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple helix, quadruple helix and quintuple helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? A proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology. *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 1(1), 41–69.
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm. *World Development*, 22(9), 1253–1268.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Chamidi, A. S., Kurniawan, B., & Soleh, A. N. (2023). Pendekatan ABCD dan manajemen. Yayasan Wiyata Bastari Samasta.

- Cooley, L., & Kohl, R. (2006). Scaling up: From vision to large-scale change A management framework for practitioners. Management Systems International.
- Davies, R., & Dart, J. (2005). The 'most significant change' (MSC) technique: A guide to its use. MandE.
- Day, R. A., & Gastel, B. (2017). How to write and publish a scientific paper (8th ed.). Cambridge University Press.
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review*, 70(11), 35–36.
- Eade, D. (1997). Capacity-building: An approach to people-centred development. Oxfam.
- European Commission. (2004). Aid delivery methods: Project cycle management guidelines. EuropeAid Cooperation Office.
- Fals Borda, O., & Rahman, M. A. (Eds.). (1991). Action and knowledge: Breaking the monopoly with participatory action research. Apex Press.
- Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Pitman.
- Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Herder and Herder.
- Haris, N. K. A. (2026). Analisis prioritas dan akar masalah program penanggulangan malaria menggunakan metode USG dan Fishbone di Direktorat Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 7(1).
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000:2018 Risk management Guidelines. ISO.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). The action research planner (3rd ed.). Deakin University Press.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Kim, C. (2021). The pathway of university-community collaboration for preventing youth violence. *World Journal of Education and Humanities*, 3(2), 50–61.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets. ACTA Publications.

- Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). Ten steps to a results-based monitoring and evaluation system: A handbook for development practitioners. World Bank.
- Lestari, F., Azwar, B., Jonnius, N. A., & Abduh, M. A. (2022). Partner engagement on university's community service program in Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 10(2/3), 396–411. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2022.126241>
- Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. *Journal of Social Issues*, 2(4), 34–46.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
- Mayne, J. (2001). Addressing attribution through contribution analysis: Using performance measures sensibly. *The Canadian Journal of Program Evaluation*, 16(1), 1–24.
- Mendelow, A. L. (1991). Stakeholder mapping [Conference paper]. 2nd International Conference on Information Systems, Cambridge, MA.
- Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. Jossey-Bass.
- Murwati. (2024). Pendekatan partisipatif dalam pengabdian kepada masyarakat. In U. Khasanah et al., *Metodologi pengabdian kepada masyarakat: Teori dan implementasi*. Tahta Media Group.
- Nainiti, N. P. P. E. (2024). Metode PAR (Participatory Action Research). In U. Khasanah et al., *Metodologi pengabdian kepada masyarakat: Teori dan implementasi* (pp. 82–98). Tahta Media Group.
- National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. (1979). The Belmont Report: Ethical principles and guidelines for the protection of human subjects of research. U.S. Department of Health, Education, and Welfare.
- Nicholls, J., Lawlor, E., Neitzert, E., & Goodspeed, T. (2012). A guide to Social Return on Investment (rev. ed.). The SROI Network.
- NORAD. (1999). The logical framework approach (LFA): Handbook for objectives-oriented planning (4th ed.). Norwegian Agency for Development Cooperation.
- Nuridin, N. (2023). Pengabdian kepada masyarakat: Dalam konsep dan implementasi. *Faedah: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia*.

- OECD. (1991). DAC principles for evaluation of development assistance. OECD Development Assistance Committee.
- OECD/DAC Network on Development Evaluation. (2019). Better criteria for better evaluation: Revised evaluation criteria definitions and principles for use. OECD.
- Rahmat, A., Fauziah, N., & Hidayat, R. (2020). Model participation action research dalam pemberdayaan masyarakat. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 1–10.
- Trisnawati, S. N. I. (2024). Konsep dan manfaat kolaborasi. In U. Khasanah et al., *Metodologi pengabdian kepada masyarakat: Teori dan implementasi* (pp. 11–21). Tahta Media Group.
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development (A/RES/70/1). United Nations General Assembly.
- Universitas Sanata Dharma. (2021). Pedoman pengabdian kepada masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sanata Dharma.
- Witkin, B. R., & Altschuld, J. W. (1995). Planning and conducting needs assessments: A practical guide. Sage Publications.
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of community psychology* (pp. 43–63). Plenum.

GLOSARIUM

Agen multiplikasi: Kader lokal yang menyebarkan pengetahuan dan kesadaran kritis yang telah diperoleh kepada warga lain di luar jangkauan langsung tim pengabdian (lihat Subbab 8.6).

Aset komunitas: Segala sumber daya yang telah dimiliki masyarakat individu, asosiasi, institusi lokal, fisik, dan ekonomi lokal yang dapat dimobilisasi untuk mendukung perubahan (lihat Bab 6).

Atribusi dan kontribusi: Dua cara memaknai hubungan sebab-akibat dalam evaluasi dampak: atribusi mengklaim kausalitas mutlak, sedangkan kontribusi mengakui peran program di tengah faktor lain yang turut berperan (lihat Subbab 11.5).

Baseline: Potret kondisi awal masyarakat sasaran yang terdokumentasi secara sistematis sebelum program dilaksanakan, menjadi titik rujukan pengukuran perubahan (lihat Subbab 2.7).

Coaching dan mentoring: *Coaching* menggali potensi yang sudah dimiliki seseorang melalui pertanyaan reflektif; *mentoring* adalah relasi pembelajaran jangka panjang antara seseorang yang lebih berpengalaman dan yang sedang berkembang (lihat Subbab 8.4).

CREAM: Kriteria indikator kinerja yang baik: *clear, relevant, economic, adequate, monitorable* (lihat Subbab 3.4).

Elite capture: Kondisi ketika proses atau manfaat partisipatif didominasi oleh kelompok elite lokal, sehingga suara kelompok rentan terpinggirkan (lihat Subbab 1.5).

Exit strategy: Strategi pengakhiran pendampingan yang direncanakan secara bertahap agar masyarakat siap melanjutkan program secara mandiri (lihat Subbab 8.7).

Focus Group Discussion (FGD) : Teknik pengumpulan data melalui diskusi terarah pada kelompok kecil untuk menggali perspektif secara mendalam (lihat Subbab 7.3).

Gap analysis: Analisis kesenjangan antara kondisi eksisting dan kondisi ideal yang menjadi dasar perumusan tujuan program (lihat Subbab 2.4).

IMRaD: Struktur baku artikel ilmiah: Introduction, Methods, Results, and Discussion (lihat Subbab 13.6).

Impact (dampak) : Perubahan kondisi jangka panjang yang dihasilkan suatu program, baik diharapkan maupun tidak (lihat Bab 11).

Kerangka kerja logis (*logical framework*) : Matriks perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, indikator, sumber verifikasi, dan asumsi suatu program (lihat Subbab 3.5).

Kesenjangan digital (*digital divide*) : Perbedaan akses infrastruktur dan literasi digital antarwilayah atau kelompok masyarakat yang perlu dipertimbangkan sebelum menerapkan solusi berbasis teknologi (lihat Subbab 14.5).

Konsientisasi: Proses kesadaran kritis masyarakat terhadap kondisi sosialnya sendiri, sebagaimana dirumuskan Freire (lihat Subbab 1.3).

Kriteria OECD-DAC: Enam kriteria evaluasi program pembangunan: relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan (lihat Subbab 10.6).

Local leader: Tokoh atau kader yang muncul dari dalam komunitas dan mampu menggerakkan proses perubahan secara mandiri (lihat Subbab 5.2).

Matriks kekuatan-kepentingan (*power-interest matrix*) : Alat pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan besarnya pengaruh dan kepentingan mereka terhadap suatu program (lihat Subbab 12.2).

MoU dan MoA: Nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) sebagai payung kerja sama jangka menengah–panjang, dan perjanjian kerja sama (*memorandum of agreement*) yang merinci kesepakatan teknis (lihat Subbab 12.3).

Most Significant Change (MSC) : Teknik monitoring dan evaluasi partisipatif berbasis pengumpulan kisah perubahan paling bermakna dari masyarakat (lihat Subbab 10.5).

Outcome: Perubahan perilaku, pengetahuan, atau sikap masyarakat sasaran dalam jangka menengah akibat suatu program (lihat Subbab 3.1 dan 11.2).

Output: Produk atau layanan langsung yang dihasilkan suatu kegiatan (lihat Subbab 3.1 dan 11.2).

Partisipasi: Derajat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan suatu program, mulai dari manipulasi hingga kontrol warga (lihat Subbab 4.2).

Participatory Action Research (PAR) : Metode riset yang menyatukan partisipasi, penelitian sistematis, dan aksi sosial dalam siklus perencanaan-aksi-observasi-refleksi (lihat Bab 5).

Pentahelix: Model kolaborasi lima aktor akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media dalam ekosistem pengabdian, diadaptasi dari model quintuple helix (lihat Subbab 12.5).

Pemberdayaan (*empowerment*) : Proses penguatan kendali dan kapasitas individu, organisasi, atau komunitas atas kehidupan mereka sendiri (lihat Subbab 4.3).

Prinsip Belmont: Tiga prinsip etika riset yang melibatkan manusia: *respect for persons* (menghormati otonomi), *beneficence* (memaksimalkan manfaat), dan *justice* (keadilan distribusi manfaat dan beban) (lihat Subbab 14.1).

Problem tree (pohon masalah) : Alat analisis akar masalah yang menggambarkan persoalan dalam struktur akar (penyebab), batang (masalah inti), dan dahan (akibat) (lihat Subbab 2.5).

Participatory Rural Appraisal (PRA) : Kumpulan teknik partisipatif untuk pengumpulan dan analisis data bersama masyarakat menggunakan media visual (lihat Bab 7).

RACI: Matriks pembagian peran: *Responsible, Accountable, Consulted, Informed* (lihat Subbab 9.3).

Replikasi dan *scaling up* : Replikasi menyalin model program yang terbukti berhasil ke lokasi baru; *scaling up* memperluas dampak secara sistematis hingga menjangkau populasi yang jauh lebih besar, seringkali melalui kebijakan (lihat Subbab 11.6–11.7).

SMART: Kriteria perumusan sasaran program: *specific, measurable, assignable, realistic, time-related* (lihat Subbab 3.2).

Social Return on Investment (SROI) : Kerangka yang mengonversi nilai sosial suatu program ke dalam satuan moneter untuk dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan (lihat Subbab 11.4).

Stakeholder (pemangku kepentingan) : Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan dan hasil suatu program (lihat Subbab 12.2).

Theory of change : Rantai asumsi eksplisit yang menghubungkan input, aktivitas, *output, outcome*, hingga impact suatu program (lihat Subbab 3.1).

Triangulasi: Prinsip validasi data melalui perbandingan berbagai sumber, metode, atau waktu pengumpulan (lihat Subbab 2.2).

Trust building : Proses membangun kepercayaan antara tim pengabdian dan masyarakat melalui interaksi yang konsisten dan dapat diandalkan dari waktu ke waktu (lihat Subbab 1.2 dan 12.3)

INDEKS

A

Analisis akar masalah, 25

B

Baseline, xii, xix, 19, 29, 160

Belmont Report, 31, 106, 148, 150, 158

D

Desain program, 34, 41, 47, 100

E

Elite capture, 160

Exit strategy, 43, 160

I

Identifikasi masalah, 20

Implementasi program, 109

Indikator keberhasilan, 38

K

Kemitraan, xv, xvi, 55, 125, 126, 127, 133, 134

M

Monitoring dan evaluasi, 109

Most Significant Change, xx, 113, 119, 122, 161

P

PAR (Participatory Action Research), 158

Paradigma PkM, 5

Pemetaan sosial, 83

Pentahelix, xvi, xix, 130, 131, 161

Proposal PkM, xvi, xix, 135, 136

R

Rencana keberlanjutan, 43

S

Scaling up, 123, 157

SDGs, 153

SMART, 33, 36, 38, 45, 139, 162

T

Theory of change, 162

Transformasi digital, 152

Triangulasi, 162

PROFIL PENULIS



Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I.

lahir di Sukoharjo, pada 07 April 1988, Pendidikan terakhir Penulis adalah Doktor Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta 2022. Penulis menjadi Dosen pada tahun 2017. Memulai karir di STAI Muhammadiyah Klaten 2017-2020 dengan pengalaman struktural sebagai Kepala LPM. Lanjut pada tahun 2021-2022 berkarir di Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta. Pengalaman Struktural Pernah menjadi Kepala LPM, Tim Audit Mutu Internal (AMI), Kaprodi S2 PAI, Direktur Pascasarjana di Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman (UNDARIS) Kab. Semarang, saat ini menjabat sebagai Kaprodi S2 Pendidikan Agama Islam masa bakti 2024-2028. Selain itu penulis merupakan Owner and Founder Penerbit Tahta Media Group. Untuk melengkapi pengalamannya Penulis merupakan Reviewer dan Editor di beberapa Journal, Fasilitator Penulisan Buku Perguruan Tinggi (Buku Ajar, Monograf dan Refrensi). Penulis juga aktif di Asosiasi Dosen PTKIS Indonesia (ADPETIKISINDO) selaku Wakil V (MURII dan Duta Dosen) LNI (Lacuna+Novelty+Inovasi+Publikasi) Periode 2024-2029. Buku dan Artikel yang pernah ditulis dan dipublikasikan bisa dilihat melalui link dibawah:

<https://scholar.google.com/citations?user=UAlcP6wAAAAJ&hl=id>,

ID Sinta Penulis

<https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6875840>

Penulis dapat dihubungi melalui Email:

uswatunkhasanah6815@gmail.com



Arsyil Waritsman, S.Pd., M.Pd

lahir di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Penulis menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Tadulako Palu, pada Tahun 2009. Setelah lulus, penulis mengawali karier sebagai guru Matematika di SMA Negeri 1 Tolitoli pada Tahun 2010-2014. Pada Tahun 2015, Penulis melanjutkan pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Yogyakarta, dan berhasil menyelesaikannya pada Tahun 2017. Perjalanan akademiknya berlanjut dengan bergabung menjadi Dosen di Universitas Madako Tolitoli hingga Tahun 2020. Selama menjadi dosen, Penulis telah memperoleh sertifikat pendidik sebagai Dosen Profesional di bidang Matematika dan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Madako Tolitoli. Saat ini, Penulis berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan fungsional Widyaiswara pada Balai Diklat Keagamaan Ambon, Kementerian Agama RI. Selain itu, penulis juga aktif sebagai *Editor-in-Chief* pada salah satu Jurnal Nasional Terakreditasi. Selain aktif mengajar, Penulis juga aktif dalam menghasilkan berbagai karya ilmiah berupa artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding, dan buku terkait pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Pada September 2025, penulis kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral (S3) di Program Studi Administrasi Pendidikan, Universitas Pattimura.



DESAIN DAN METODOLOGI PENGABDIAN **KEPADA MASYARAKAT:** Dari Gagasan Menjadi Program Berdampak

Pengabdian kepada masyarakat bukan sekadar kegiatan untuk memenuhi kewajiban tridarma perguruan tinggi, tetapi merupakan proses ilmiah dan transformatif untuk menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Agar program pengabdian mampu menghasilkan perubahan yang bermakna, diperlukan desain yang sistematis, pemilihan metodologi yang tepat, pelaksanaan yang partisipatif, serta evaluasi yang mampu mengukur dampak program.

Buku *Desain dan Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat: Dari Gagasan Menjadi Program Berdampak* hadir sebagai panduan konseptual sekaligus praktis dalam merancang dan melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat secara terstruktur. Buku ini mengajak pembaca memahami seluruh tahapan pengabdian, mulai dari menemukan dan menganalisis masalah, memetakan kebutuhan dan potensi masyarakat, merancang program, memilih pendekatan dan metode, hingga melaksanakan, mengevaluasi, dan mengukur dampak program.

Berbagai pendekatan metodologis dibahas secara aplikatif, antara lain *Participatory Action Research (PAR)*, *Asset-Based Community Development (ABCD)*, *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, pendekatan pemberdayaan, kolaboratif, dan transformatif. Pembahasan dilengkapi dengan prinsip perencanaan program, strategi pemberdayaan, monitoring dan evaluasi, pengukuran outcome dan impact, pengembangan kemitraan, keberlanjutan program, hingga penyusunan proposal, laporan, dan publikasi hasil pengabdian.

Buku ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga membantu pembaca mengubah gagasan menjadi desain program, desain menjadi aksi, dan aksi menjadi perubahan yang dapat diukur. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat diharapkan tidak berhenti pada terlaksananya kegiatan, tetapi mampu menciptakan manfaat, kemandirian, dan perubahan yang berkelanjutan.

Buku ini relevan bagi dosen, mahasiswa, peneliti, pengelola program pengabdian, lembaga perguruan tinggi, praktisi pemberdayaan masyarakat, serta siapa pun yang ingin mengembangkan program pengabdian yang sistematis, partisipatif, inovatif, dan berdampak.



IKAPI
INSTITUT KEMAHIRUAN DAN INOVASI

CV. Tahta Media Group

Sukoharjo, Jawa Tengah

Web : www.tahtamedia.co.id

Ig : tahtamedia group

Telp/WA : +62 896 5427 3996

